

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692037/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 9.122.025.000 (SEMBILAN MILIAR SERATUS DUA PULUH DUA JUTA DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.01.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 9.122.025.000
Rp. 9.122.025.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 9.122.025.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 9.122.025.000

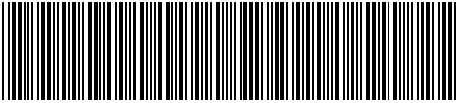
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
I A. INFORMASI KINERJA



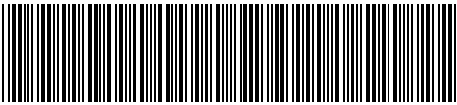
DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				9.122.025.000	
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				9.122.025.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,00	Layanan, Perkara	8.414.281.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Layanan Kerja Sama		1.00	Layanan	159.502.000
		02	EBA.959	Layanan Protokoler		1.00	Layanan	171.916.000
		03	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	13.476.000
		04	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	8.062.103.000
		05	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1.00	Layanan	5.870.000
		06	EBA.Z07	Layanan BMN		1.00	Layanan	1.414.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		14,00	Unit, m2, Paket	480.149.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		14.00	Unit	480.149.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		70,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.712.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10	Layanan Manajemen SDM		70.00	Orang	83.712.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7,00	Layanan, Rekomendasi	143.883.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	104.792.000
		02	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.00	Rekomendasi	7.300.000
		03	EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Layanan	10.943.000
		04	EBD.Z32	Layanan Reformasi Kinerja		1.00	Layanan	10.934.000
		05	EBD.Z34	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1.00	Layanan	1.800.000
		06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan	8.114.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

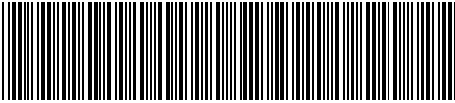
Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan, Rekomendasi

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7409-6685-7185-2057

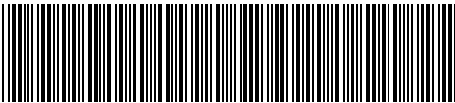
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	9.122.025.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	9.122.025.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

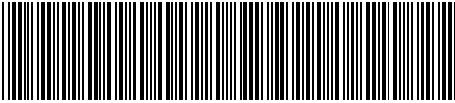


DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692037	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	5.117.784	3.524.092	480.149	-	-	9.122.025	34 . 00	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.117.784	3.524.092	480.149	-	-	9.122.025		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	5.117.784	3.524.092	480.149	-	-	9.122.025		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	5.117.784	3.296.497	-	-	-	8.414.281		
01	RM	5.117.784	3.296.497	-	-	-	8.414.281		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	-	-	480.149	-	-	480.149		
01	RM	-	-	480.149	-	-	480.149		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	-	83.712	-	-	-	83.712		
01	RM	-	83.712	-	-	-	83.712		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	-	143.883	-	-	-	143.883	34 . 00	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

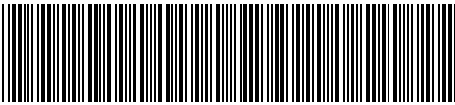
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	143.883	-	-	-	143.883	178	
JUMLAH		5.117.784	3.524.092	480.149	-	-	9.122.025		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (692037) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

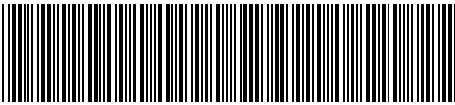
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692037	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	790.642	753.507	1.225.627	838.023	735.111	581.734	722.235	811.565	822.065	756.365	834.151	251.002	9.122.025
		BELANJA PEGAWAI	412.398	414.599	434.498	496.400	422.106	496.838	505.270	416.132	428.610	426.909	414.724	249.301	5.117.784
		BELANJA BARANG	378.244	338.908	310.980	341.623	313.005	84.895	216.965	395.433	393.455	329.456	419.427	1.700	3.524.092
		BELANJA MODAL	0	0	480.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.149
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	790.642	753.507	1.225.627	838.023	735.111	581.734	722.235	811.565	822.065	756.365	834.151	251.002	9.122.025
		51 BELANJA PEGAWAI	412.398	414.599	434.498	496.400	422.106	496.838	505.270	416.132	428.610	426.909	414.724	249.301	5.117.784
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	378.244	338.908	310.980	341.623	313.005	84.895	216.965	395.433	393.455	329.456	419.427	1.700	3.524.092
		53 BELANJA MODAL	0	0	480.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.149

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
IV A. B L O K I R



DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [692037] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

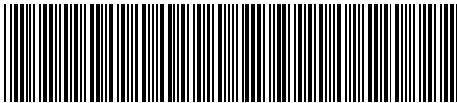
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692037/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7409-6685-7185-2057

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [692037] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA